

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN SIKAP DAN ORIENTASI PEMILIH TERHADAP CALON LEGISLATIF PADA PEMILU 2009 DI DAERAH PEMILIHAN TAWANG-CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA

Oleh : Edi Kusmayadi¹, Akhmad Satori², Mohammad Ali Andrias³,
Taufik Nurohman⁴, Chandra Budi LS⁵,

1. Alumni Magister Administrasi Negara STIA Tasikmalaya
 2. Alumni Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
 3. Alumni Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed Purwokerto²⁻⁴
 4. Ketua Prodi Ilmu Politik FISIP UNSIL¹, Staf Pengajar Program Studi Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya¹⁻⁵
-

ABSTRACT

The Elements who Influence Orientation and Attitudes Voters Concerning Legislative Candidates in General Election 2009 at Election District Tawang-Cihideung Tasikmalaya City. Voters behavior in general election 2009 very different with voters behavior in general election 2004. Voters confronted with legislative candidates who have to be votes and so do the political party who take the legislative candidates, so many voters who had multiple diverse orientation and attitude. The most attitude who have affected orientation and attitude voters to legislative candidates.

This research be done at election district 1 Cihideung-Tawang, in this district there are 116 legislative candidates from 25 political party who there in election district 1, they are joining in legislative election 2009. living hood, primordialism, voters loyalty, job and propechy, it becomes the most influence elements of orientation and attitude change of the voters.

Key word : voters behavior, orientation, attitude change.

ABSTRAK

Perilaku pemilih pada pemilu 2009 sangat berbeda dengan perilaku pemilih pada tahun 2004, pemilih dihadapkan pada banyaknya calon legislatif yang harus dipilih, demikian pula parpolnya yang mengusungnya, sehingga banyak pemilih yang memiliki sikap dan orientasi yang sangat beragam. Sikap yang paling dominan yang mempengaruhi perubahan sikap dan orientasi pemilih terhadap calon legislatif.

Penelitian ini dilakukan di Daerah Pemilihan 1 Cihideung-Tawang, wilayah ini terdapat 116 calon legislatif dari 25 parpol yang ada di Daerah Pemilihan I, yang ikut serta dalam proses pemilihan legislatif pada pemilu 2009. faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan sikap dan orientasi pemilih antara disebabkan oleh faktor tempat tinggal, ikatan primodialisme pemilih, penyebaran penduduk, loyalitas pemilih, latar belakang pekerjaan atau profesi.

Kata Kunci : Perilaku Pemilih, Orientasi, Perubahan Sikap.

¹ Angkatan 2003 lulus tahun 2005

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Sikap Dan Orientasi Pemilih Terhadap Calon Legislatif Pada Pemilu 2009 Di Daerah Pemilihan Tawang-Cihideung Kota Tasikmalaya (Edi Kusmayadi, Akhmad Satori, Mohammad Ali Andrias, Taufik Nurohman, Chandra Budi LS)

A. PENDAHULUAN

Perjalanan politik di Indonesia pasca kemerdekaan terus mengalami perubahan sistem parpol dan sistem pemilihan umum (pemilu). Perubahan tersebut, tidak lain hanya untuk menciptakan sistem yang bisa menjadi sarana dan komunikasi politik yang efektif menuju tatanan negara demokratis, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Memasuki era reformasi, sistem politik dan pemilu multipartai terus mengalami perubahan yang signifikan. Sistem politik diarahkan untuk mencari sosok wakil rakyat atau pemimpin yang serius, serta sungguh-sungguh mendengar dan menampung aspirasi rakyatnya, agar mereka lebih sejahtera, adil dan makmur baik secara politik maupun ekonomi. Kendati demikian, masih banyak partai politik (parpol) yang belum mampu mengakomodir kuota 30% bagi kaum perempuan. Sistem politik dan pemilu era reformasi ini dianggap masih sangat lemah, bahkan demokrasi yang diberikan kepada rakyat dianggap telah kebablasan. Kemudian dengan multi partai ini beberapa partai besar tidak cukup kuat untuk membentuk pemerintahan yang stabil, karena mereka dengan terpaksa harus membentuk koalisi dengan parpol, dengan azas dan program yang berbeda. Oleh sebab itu, parpol tersebut akan menghadapi kemungkinan perubahan dukungan, yang sewaktu-waktu akan menarik dukungan jika tujuan koalisi tidak tercapai.

Lebih ironis lagi, keniscayaan terhadap *money politic* (politik uang) dalam proses politik di era reformasi sekarang ini, bukan merupakan rahasia umum lagi bahkan dianggap sebagai prasyarat jika ingin menjadi pemenang pemilu atau menjadi wakil rakyat atau pemimpin daerah. Kondisi ini telah mencerminkan bahwa parpol belum bekerja dengan baik sebagai struktur yang mampu menjadi kendaraan sebagai pendidikan politik kepada masyarakat. Struktur partai seharusnya menjalankan fungsi-fungsi partai sebagai alat untuk melakukan pendidikan dan sosialisasi politik yang baik, masyarakat akan dapat memiliki wawasan, kompetensi, dan komitmen sebagai wakil atau pemimpin, yakni dalam rangka mewujudkan perbaikan dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, keniscayaan terhadap uang telah menunjukkan bahwa parpol belum berfungsi secara optimal dalam mempopulerkan kadernya yang hendak dijadikan sebagai wakil rakyat atau pemimpin. Secara teknis, hal ini terjadi karena lebih banyak parpol belum memiliki struktur sampai ke bawah. Karena itu, struktur parpol tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk memperkenalkan kader-

kader yang potensial termasuk kader perempuan menjadi pemimpin di kalangan masyarakat akar rumput (*grass root*). Bahkan kerap terjadi parpol bertindak sangat pragmatis dengan hanya merekrut atau mendukung individu yang sudah populer untuk dijadikan calon, walaupun popularitas itu bukan karena kemampuan, kompetensi, dan komitmen untuk mengelola struktur negara guna memperbaiki keadaan.

Jika kondisi demikian dibiarkan terus-menerus tanpa ada sumberdaya manusia yang memadai, dalam menghadapi situasi sosial dan politik dalam negeri. Maka lambat laun masyarakat semakin tidak percaya terhadap wakil rakyat, pemimpin atau parpol yang dipilihnya secara langsung. Apalagi masyarakat kelas bawah semakin cerdas untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin kompeten yang mampu mewakili kepentingan dan aspirasinya. Jika parpol tidak segera membenahi diri dengan menempatkan kader-kader politik yang cerdas, militan, dan mau mewujudkan cita-cita visi misi partai. Lambat laun parpol akan segera ditinggalkan pemilihnya, bahkan dianggap sebagai partai yang tidak memiliki program yang jelas, yang hanya mencari keuntungan semata.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah seperti tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut;

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi sikap dan orientasi pemilih terhadap calon legislatif dalam pemilu 2009 ?
2. Seberapa besar pengaruh parpol terhadap sikap dan orientasi pemilih dalam menentukan pilihannya ?
3. Seberapa besar pengaruh platform parpol, visi misi calon legislatif dan program yang ditawarkan kepada masyarakat, terhadap elektabilitas calon.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan juga perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000:3). Secara rinci penelitian ini difokuskan pada 2 hal yakni : Implikasi yang ditimbulkan dari hubungan calon pemilih dengan calon pemilih dengan calon yang akan dipilih yang bertempat tinggal di daerah

pemilihan Tawang-Cihideung, dan pengaruh parpol yang mengusung calon legislatif sehubungan dengan implikasi yang ditimbulkan dari hubungan calon pemilih dengan calon yang akan dipilih. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, di mana peneliti akan memilih informan kunci yang dianggap mengetahui masalah yang sedang diteliti secara mendalam, dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Dalam hal ini lebih bersifat selektif, dimana peneliti akan menggunakan pertimbangan berdasarkan konsep teoritis yang digunakan, keingintahuan pribadi, karakteristik empiris, dan sebagainya (Sutopo, 1998:21).

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Perilaku Politik

Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik (Surbakti, Ramlan, 1992 : 131). Perilaku politik merupakan salah satu aspek dari perilaku secara umum karena disamping perilaku politik, masih ada perilaku yang lain seperti perilaku budaya, perilaku ekonomi, perilaku keagamaan dan sebagainya.

Sejalan dengan pengertian politik, perilaku politik berkenaan dengan tujuan masyarakat, kebijakan untuk mencapai tujuan serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas yang mengatur kehidupan masyarakat ke arah pencapaian tujuan tersebut. Karenanya interaksi antara masyarakat dan pemerintah, antar lembaga pemerintah, dan antar kelompok, individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan peningkatan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Perilaku politik meliputi tanggapan-tanggapan internal seperti persepsi-persepsi, sikap-sikap, dan keyakinan-keyakinan, juga meliputi tindakan-tindakan yang nyata seperti pemberian-pemberian suara, protes, lobbying dan lain sebagainya. Persepsi politik bertalian dengan gambaran suatu objek tertentu baik mengenai keterangan-keterangan, informasi-informasi dari sesuatu hal maupun gambaran tentang objek atau situasi politik dengan suatu cara tertentu (Putra, Fadillah, 2003 ; 200). Sedangkan sikap politik merupakan pertalian diantara keyakinan yang telah melekat dan mendorong seseorang untuk menanggapi suatu objek atau situasi politik dengan suatu cara tertentu.

2. Pendekatan Perilaku Memilih

Perilaku memilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok. Secara umum teori mengenai perilaku memilih dikategorikan ke dalam dua kubu teori yakni Mazhab Colombia dan Mazhab Michigan (Putra, Fadillah, 2003 : 201). **Kubu pertama** menekankan pada faktor sosiologis dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menentukan pilihan dalam pemilu. Model ini melihat masyarakat sebagai satu kesatuan kelompok yang bersifat vertikal dari tingkat yang terbawah hingga yang teratas.

Penganut pendekatan ini percaya bahwa masyarakat terstruktur oleh norma-norma dasar sosial yang berdasarkan atas pengelompokan sosiologis seperti agama, kelas (status sosial), pekerjaan, umur, jenis kelamin dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku memilih. Oleh karena itu preferensi pilihan terhadap suatu partai politik merupakan suatu produk dari karakteristik sosial individu yang bersangkutan (Gaffar, Afan, 1992 : 43).

Dengan kata lain, segala kelakuan politik masyarakat merupakan bentuk dari masing-masing sifat status sosial mereka. Namun demikian terdapat kelemahan dalam mazhab ini yakni :

- a. Adanya persoalan bagaimana mengukur sejumlah indikator secara tetap misalnya indikator kelas dan pendidikan, karena tidak tertutup kemungkinan konsep kelas dan pendidikan berbeda-beda antara satu negara dengan yang lain.
- b. Norma sosial tidak selalu menjamin seseorang pada saat ia menentukan pilihannya tidak akan menyimpang dari norma-norma yang dimilikinya, sehingga selalu ada kemungkinan seseorang akan bertindak menyimpang dari norma-norma atau keyakinan kelompoknya.

Kubu yang kedua lebih menekankan pada faktor psikologis dari si pemilih itu sendiri. Model ini pada dasarnya merupakan alternatif atas ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis dari model Colombia. Menurut paham ini penentuan pemilihan masyarakat dalam suatu proses pemilu banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sendiri yang kesemuanya merupakan akibat dari hasil proses sosialisasi politik. Sikap dan tingkah laku politik seseorang antara lain ditentukan oleh apa yang terkandung dalam dirinya sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, faktor biologis keinginan dan kehendak hati. Pendekatan ini menganggap sikap sebagai

variabel sentral dalam menjelaskan perilaku politik. Sikap dan tingkah laku politik seseorang amat ditentukan oleh proses sosialisasi politik yang dialami sepanjang hidupnya. Melalui proses sosialisasi, berkembang suatu ikatan yang bersifat psikologis antara si individu dengan suatu partai yang berwujud simpati terhadap partai politik yang bersangkutan. Dalam ilmu politik ikatan psikologis ini dikenal dengan istilah *Identifikasi Kepartaian*.

Identifikasi kepartaian menunjuk pada perasaan individu terhadap partai, dimana ikatan ini juga merupakan ikatan psikologis yang dapat muncul tanpa harus menjadi anggota resmi dari partai tersebut, dan bahkan tanpa suatu konsistensi untuk mendukung secara resmi suatu partai. Sedangkan menurut Campbell (dalam Putra, Fadillah, 2003 : 202). Identifikasi partai merupakan faktor yang dapat menjelaskan pola perilaku serta merupakan fakta yang sentral dalam memperhitungkan sikap dan perilaku itu sendiri. Seperti kubu sebelumnya, pendekatan ini juga mempunyai kelemahan.

Masalah hubungan antara sikap dan perilaku. Seseorang tidak selalu menyukai perilakunya karena itu belum tentu orang akan menyukai partai atau kandidat tertentu dalam pemilu akan memilih sesuai dengan sikapnya. Pendekatan ini terlalu menitikberatkan pada proses internal individu dalam membuat keputusan politik, karenanya timbul pertanyaan apakah perilaku individu mencerminkan perilaku kelompok. Model ini hanya menekankan pengaruh satu arah. Identifikasi terhadap partai dianggap sebagai *independent variable* yang mempengaruhi isu jangka pendek, isu jangka panjang kemudian keputusan memilih.

Kegiatan warga negara untuk memilih ataupun tidak memilih dalam pemilu merupakan serangkaian kegiatan membuat keputusan. Keputusan untuk memilih partai atau kandidat tertentu juga dijelaskan oleh Ramlan Surbakti (1992 : 145-146) melalui pendekatan perilaku memilih yang dibedakan dalam lima bagian yakni : (a) **Pendekatan Struktural (*Structural Approach*)**, Pendekatan ini melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilu, permasalahan dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. (b) **Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)**, Pendekatan ini menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial, sehingga pilihan seseorang dalam pemilu dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama. (c)

Pendekatan Ekologis (*Ecological Approach*), Pendekatan ini relevan hanya ketika dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. (d) **Pendekatan Psikologi Sosial (*Sosial Psychological Approach*)**, Konsep yang digunakan dalam pendekatan ini adalah identifikasi partai, konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Kongkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa pengaruh oleh faktor-faktor. (e) **Pendekatan Pilihan Rasional (*Rational Approach*)**, Pendekatan ini melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, sehingga tidak hanya mempertimbangkan “ongkos” memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada.

Individu sebagai pemilih dibedakan menjadi dua yakni pemilih yang emosional dan pemilih yang rasional (Eep Saefulloh, Tempo : 2004). Pemilih yang emosional memiliki hubungan dengan kandidat dalam bentuk loyalitas sentimental yang mengkultuskan kandidat tersebut sebagai sosok mitologis. Mereka mengabdikan diri dengan berbagai macam cara namun memiliki dasar atau fondasi yang kuat. Sedangkan pemilih yang rasional adalah pemilih yang terlebih dulu mengkalkulasikan kelayakan dan kepatutan serta aspek-aspek di sekitar kandidat yang akan mereka pilih. Mereka hanya akan memilih kandidat yang mereka yakini akan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan mereka untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

3. Budaya Politik

Istilah budaya politik mulai dikenal terutama sejak lahirnya pendekatan tingkah laku (*behavioralisme*). Budaya politik banyak dikaji dalam bidang perbandingan politik. Namun istilah ini banyak mendapat kritikan dan mulai banyak ditinggalkan. Menurut sebuah artikel yang dikeluarkan oleh wordpress (<http://pjmonte.wordpress.com/2006/10/13/kajian-budaya-politik>), Pendekatan budaya politik banyak ditinggalkan karena beberapa sebab.

Sebab pertama, konsep budaya politik terlalu abstrak. Persoalan yang ditimbulkan dari abstraknya konsep budaya politik ini antara lain adalah persoalan menentukan unit analisa. Atribut budaya politik harus diasosiasikan pada level mana: kultur individu, kelompok atau negara. Jika pada level individu, apakah bisa digeneralisasi?. Kalau pada level negara, apakah bisa

mencerminkan individu? Bila diletakkan dalam konteks kelompok (etnis atau religius misalnya), bagaimana menjelaskan variasi kultur kelompok yang satu dengan yang lainnya? Persoalan kedua yang ditimbulkan karena terlalu abstrak adalah variabel budaya sering diperlakukan sebagai variabel residu. Artinya, variabel kultur menjadi *the last resort*, kalau variabel lain tidak mampu menjelaskan sebuah fenomena.

Sebab kedua adalah bahwa politik selalu dikaitkan dengan political correctness. Artinya, budaya politik cenderung dijadikan alat untuk menyalahkan keadaan. Misalnya, apabila sebuah masyarakat gagal membangun demokrasi, maka budaya dijadikan latar belakang gagalnya demokrasi itu.

Sejak tahun 1990-an, kajian budaya politik kembali mendapat perhatian. Ada beberapa penyebabnya, diantaranya adalah mulai tersedianya data set global mengenai budaya, seperti data dari World Value Survey. Tersedianya data set ini memungkinkan budaya politik dikaji secara lebih saintifik dengan dukungan data empirik. Sehingga, kajian budaya politik tidak lagi menjadi kajian yang abstrak. Dalam literatur politik khususnya pendekatan perilaku, budaya politik sering digunakan untuk menjelaskan fakta yang hanya dilakukan dengan pendekatan kelembagaan atau pendekatan sistemik. Dengan kata lain menjelaskan dengan pendekatan budaya politik adalah upaya menembus secara lebih dalam perilaku politik seseorang atau sebuah kelompok.

Almond dan Verba mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu (Almond dan Verba, 1965: 13). Menurut kedua ahli ilmu politik ini, warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki masing-masing. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka di dalam sistem politik.

Sebenarnya pengertian budaya politik seperti ini akan membawa pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu sistem dan individu (Walter A. Rosebaum, 1975: 4). Dengan orientasi pada tingkat individu atau yang bersifat individual itu tidaklah berarti bahwa dalam memandang sistem politiknya menganggap masyarakat akan cenderung bergerak ke arah individualisme.

Dalam menggolongkan obyek orientasi politik, Almond dan Verba membagi sistem politik ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Peranan atau struktur khusus seperti badan legislatif, eksekutif, atau birokrasi.
2. Pemegang jabatan; seperti pemimpin, legislator dan administrator
3. Kebijakan, keputusan, struktur, pemegang jabatan, dan struktur secara timbal balik dapat diklasifikasi termasuk dalam proses "input" atau dalam proses administratif atau "output".

Di samping orientasi terhadap sistem politik, pandangan atau sikap warga negara juga merupakan suatu aspek budaya politik penting lainnya. Sikap atau pandangan ini berkaitan dengan "rasa percaya" (*trust*) dan "permusuhan" (*hostility*) yang biasanya memang terdapat antara warga negara yang satu dengan warga negara lainnya, kelompok yang satu dengan kelompok lainnya atau antara golongan satu dengan golongan lainnya dalam masyarakat (Almond dan Bingham Powell. 1978: 37-39). Perasaan-perasaan yang demikian terlihat pada sikap seseorang terhadap pengelompokan yang ada disekitarnya, baik yang berbentuk kelas, etnis, kedaerahan, agama, maupun antar kelompok agama itu sendiri. Dalam hal ini pengelompokan-pengelompokan tersebut mempengaruhi, baik dalam arti melahirkan sikap percaya maupun sikap bermusuhan seseorang.

Budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang di dalam dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antarorientasi dan antarnilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kontak-kontak antara budaya politik suatu kelompok, atau yang mungkin lebih tepat disebut "subbudaya politik", dengan budaya politik kelompok lainnya (Nazaruddin Syamsudin, 1991: 22-23).

Albert Widjaja (1988: 24) menyatakan budaya politik adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebgain besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Albert Widjaja menyamakan budaya politik dengan konsep "ideologi" yang dapat berarti "sikap mental", "pandangan hidup", dan "struktur pemikiran". Budaya politik, menurutnya, menekankan ideologi yang umum berlaku di masyarakat, bukan ideologi perorangan yang sifatnya sering khusus dan beragam

Almond dan Verba, selain mengelompokkan tipe orientasi budaya politik, juga melakukan klasifikasi tipe-tipe budaya politik. Kebudayaan politik dikategorikan menjadi kebudayaan politik parokial, subyek, dan partisipan (Almond dan Verba, 1984: 20-22).

Tabel 1. Tipe-Tipe Kebudayaan Politik

	Sistem sebagai Obyek Umum	Obyek-Obyek Input	Obyek-Obyek Output	Pribadi sebagai Partisipan Aktif
Parokial	0	0	0	0
Subyek	1	0	1	0
Partisipan	1	1	1	1

Sumber : Almond dan Verba, 1984: 19

Kebudayaan politik parokial dalam sistem politik lebih bersifat afektif dan normatif. Dengan kata lain, masyarakat yang ada dalam sistem politik tersebut mempunyai orientasi afektif. Kesadaran obyek politiknya kecil atau tidak ada sekali terhadap sistem politik. Kelompok ini akan ditemukan di berbagai lapisan masyarakat. Frekuensi orientasi terhadap keempat jenis obyek politik dalam tabel 2 mendekati nol.

Kebudayaan politik subyek Mochtar Masoed menyebutnya (kebudayaan politik kaula), memiliki ciri masyarakat menyadari adanya otoritas pemerintah, mereka secara efektif diarahkan untuk terhadap orientasi tersebut, mereka mungkin menunjukkan kebanggaannya terhadap sistem itu, atau mungkin tidak menyukainya tapi hubungannya dengan sistem politik menunjukkan pola hubungan yang pasif. Dalam tabel 2 terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan output dari sistem itu, tetapi terhadap input dan sebagai individu yang aktif, mendekati nol.

Terakhir, Kebudayaan politik partisipan. Tipe kebudayaan politik partisipan adalah suatu bentuk kebudayaan dimana anggota-anggota masyarakat memiliki partisipasi aktif terhadap sistem politik, dan sudah bisa mengevaluasi jalannya sistem politik.

Menurut Almond dan Verba (1984: 24), kebudayaan politik yang ideal adalah adanya keharmonisan antara struktur dan budaya politik. Kebudayaan parokial, subyek, dan partisipan hampir sama dengan struktur politik yang tradisional, otoritarian, dan demokratis.

Kebudayaan politik juga bisa berupa bersifat campuran, yaitu kebudayaan subyek parokial, kebudayaan partisipan subyek, dan kebudayaan parokial partisipan (Almond dan Verba, 1984: 27-31).

Kebudayaan subyek parokial adalah suatu tipe kebudayaan politik dimana sebagian besar penduduk menolak tuntutan-tuntutan eksklusif masyarakat kesukuan atau desa atau otoritas feodal dan telah mengembangkan kesetiaan terhadap sistem politik yang lebih kompleks dengan struktur-struktur pemerintahan pusat yang bersifat khusus. Jadi mulai ada pergeseran atau perubahan dari kebudayaan parokial menuju kebudayaan politik subyek.

Kebudayaan partisipan subyek, mulai terjadi perubahan dari budaya subyek kepada budaya partisipan. Sebagian besar penduduk telah memperoleh orientasi-orientasi input yang bersifat khusus dan serangkaian orientasi pribadi sebagai seorang aktivis, sementara penduduk yang lain terus diorientasikan kearah suatu struktur pemerintahan dan secara relatif memiliki rangkaian orientasi yang pasif. Kebudayaan parokial partisipan, banyak terdapat di negara sedang berkembang. Budaya yang dominan adalah parokial. Norma-norma struktural diperkenalkan bersifat partisipan, demi keselarasan dengan struktur politik.

Perkembangan pada subbudaya politik, menurut Nazaruddin Syamsudin, dipengaruhi oleh dua faktor dominan, yakni adat istiadat dan sistem kepercayaan (agama). Adat dan agama memainkan peranan yang besar dalam proses penyerapan dan pembentukan pandangan masyarakat tentang kekuasaan atau simbol-simbol yang ada disekitarnya. Adat dan agama telah mempengaruhi atau memberi bentuk pola sikap/pandangan individual anggota masyarakat mengenai peranan yang mungkin dimainkannya dalam sistem politik (1991: 34-45).

4. Partisipasi Politik

a. Hakikat dan Bentuk Partisipasi Politik

Istilah partisipasi politik telah digunakan dalam berbagai arti. Apakah partisipasi politik itu hanya perilaku, atau mencakup pula sikap-sikap dan persepsi-persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi perilaku partisipasi (misal: informasi politik, persepsi seseorang tentang relevansi). Miriam Budiardjo (Sudijono Sastroatmodjo 1995: 68) secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Sementara itu, Huntington & Nelson (Sudijono Sastroatmodjo 1995: 68) membatasi pengertian partisipasi politik pada beberapa hal:

Pertama, partisipasi politik hanyalah mencakup kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini, mereka tidak memasukkan komponen-komponen subjektif seperti pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik, keefektifan politik, keefektifan-keefektifan politik. Tetapi yang lebih ditekankan adalah bagaimana berbagai sikap dan perasaan tersebut berkaitan dengan bentuk tindakan politik. **Kedua**, yang dimaksudkan dalam partisipasi politik itu adalah warga negara preman (biasa), bukan pejabat-pejabat pemerintah. Hal itu didasarkan pada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai pekerjaan profesional di bidang itu, padahal justru kajian ini pada warga negara biasa. **Ketiga**, kegiatan partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi politik yang demikian merupakan tindakan-tindakan yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, terlepas apakah itu legal atau tidak. Dengan itu protes-protes, demonstrasi, kekerasan bahkan bentuk kekerasan pemberontakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dapat disebut sebagai partisipasi politik. **Keempat**, partisipasi politik juga mencakupi semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas tindakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal. **Kelima**, partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak langsung; artinya langsung oleh pelakunya itu sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pemerintah.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Partisipasi politik itu merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah. Yang melakukan kegiatan politik yakni warga negara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan dan warga negara biasa yang tidak memiliki jabatan pemerintahan. Pemerintah memiliki kewenangan membuat dan melaksanakan keputusan politik, sedangkan masyarakat tidak memiliki kewenangan. Akan tetapi, keputusan politik

menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

b. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan bentuk tingkah laku baik menyangkut aspek sosial maupun politik. Tindakan-tindakan dan aktivitas politik tidak hanya menyangkut apa yang telah dilakukan saja, tetapi juga menyangkut hal-hal atau motif-motif apa yang mendorong individu atau kelompok berpartisipasi. Untuk itu masih dalam Sudjono Sastroatmodjo (1995, Hal: 83) yang dikutip dari Weber mendefinisikan empat motif tersebut. **Pertama**, motif yang rasional-bernilai, yaitu motif yang didasarkan atas penerimaan secara rasional atas nilai-nilai suatu kelompok. Motif rasional –bernilai merupakan motif yang mendorong tingkah laku untuk beraktifitas atas dasar pertimbangan-pertimbangan logis dan rasional terhadap suatu kelompok. Tindakan seseorang dalam aktifitas politik telah didukung oleh penilaian-penilaian objektif terhadap suatu kelompok tertentu. Bukan berarti motif ini terlepas dari unsur-unsur individual tetapi seorang individu telah dibekali cara-cara rasional, melalui pertimbangan-pertimbangan yang nalar. **Kedua**, motif yang afektual-emosional, yaitu motif yang didasarkan pada kebencian tertentu yang melekat pada individu dalam menilai gagasan, organisasi, atau individu lain. Konsep ini membentuk sikap apriori, ketidaksenangan terhadap suatu kelompok kemudian dalam bentuk yang selanjutnya menjadi bentuk apatisme, sinisme, dan aliensi. **Ketiga**, motif tradisional, yaitu motif yang didasarkan pada penerimaan norma tingkah laku individu dalam suatu kelompok sosial. Dimana terjadi kesesuaian antara norma-norma dan nilai-nilai, antara individu dan kelompok sosial, yang mau menyebabkan individu tersebut mau bergabung dalam partisipasi dalam kelompok tersebut. **Keempat**, motif yang didasarkan pada pertimbangan keuntungan, yaitu aktivitas selain didasarkan atas keuntungan-keuntungan apa yang dapat diperolehnya dari kegiatan politik itu.

Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang, ialah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, serta menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia

hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak?

Kedua faktor di atas bukan faktor-faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel yang independen). Artinya, tinggi rendahnya kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial dan status ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud dengan status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Yang dimaksud dengan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Hal ini diketahui dari pendapatan, pengeluaran, ataupun pemilikan benda-benda berharga. Seseorang yang memiliki status sosial dan status ekonomi yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik, serta sikap dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Hubungan faktor-faktor tersebut yaitu: status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi dikelompokkan sebagai variabel pengaruh atau variabel independen. Sedangkan kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah dikategorikan sebagai variabel antara atau intervening variables. Lalu, partisipasi politik dikategorikan sebagai variabel terpengaruh atau variabel dependen.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sikap dan Orientasi

Jumlah kursi yang diperebutkan pada Pemilu Legislatif 2009 untuk Kota Tasikmalaya sebanyak 45 kursi (pasal 26 ayat 2 point f) kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 sampai dengan 1.000.000 jiwa untuk memperoleh alokasi 45 kursi, berikut ini rekapitulasi jumlah pemilih di daerah pemilihan I Kecamatan Tawang-Cihideung.

Jumlah Pemilih dan TPS di Daerah Pemilihan I

No	Kelurahan	Jumlah Pemilih			Jumlah TPS
		L	P	L + P	
1	Kahuripan	6356	6484	12840	36
2	Cikalang	4487	4710	9197	25
3	Empangsari	2724	2910	5634	16
4	Tawang Sari	2283	2043	4326	13
5	Lengkongsari	5335	5481	10816	27
6	Tugujaya	3539	3364	6903	17
7	Tuguraja	6954	6846	13800	37

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Sikap dan Orientasi Pemilih
Terhadap Calon Legislatif Pada Pemilu 2009
Di Daerah Pemilihan Tawang-Cihideung Kota Tasikmalaya**

8	Nagarawangi	2704	2771	5475	14
9	Yudanegara	1967	2104	4071	11
10	Cilembang	5383	5368	10751	28
11	Argasari	4177	4172	8349	22
12	TPS Khusus R.S Jasa Kartini	-	-	-	1
13	TPS Khusus R.S Umum Daerah	-	-	-	1
Jumlah		45909	46253	92162	248

Daerah pemilihan Cihideung – Tawang termasuk DP 1 dengan jumlah calon sebanyak 116 orang, sementara alokasi/jatah kursi dari DP 1 sebanyak 10 kursi, dengan demikian setiap satu orang calon akan bersaing untuk memperebutkan jatah 10 kursi atau 1 : 11 orang, artinya setiap satu calon akan bersaing dengan sebelas calon legislatif. Tentu hal tersebut bukan hal yang mudah untuk memperolehnya. Oleh karena itu berbagai metode, strategi dan alat untuk mendapatkan suara dilakukan oleh setiap calon, guna memperoleh simpati dari masyarakat. Kendati demikian, masih banyak calon legislatif yang melakukan cara pendekatan yang kurang efektif, sehingga masyarakat dihadapkan pada kesulitan untuk menentukannya. Hal ini terkait dengan strategi yang diterapkan kandidat yang melakukan pendekatan kepada masyarakat lewat kegiatan pengajian rutin yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan atribut seorang tokoh agama, penceramah, atau ustad. Dengan materi ceramah keagamaan yang pada akhirnya meminta dukungan dan do'a dari mustami pengajian.

Pada kondisi tersebut seorang kandidat tidak memberikan deskripsi tentang visi, misi dan program ke depan ketika yang bersangkutan jadi anggota legislatif. Pada tataran seperti ini, maka pemilih merespon dengan sangat beragam, ada yang tertarik hanya karena materi pengajiannya, tertarik karena berperan sebagai calon yang menguasai bidang agama, tertarik karena giguritasnya, tertarik karena bantuan materinya, tertarik karena reputasi di masyarakat, serta tertarik karena ketokohnya dan sebagainya.

Karakteristik pemilih di daerah pemilihan Tawang – Cihideung Kota Tasikmalaya, diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Faktor Tempat Tinggal

1. Sistem Kekerabatan

Terdapat beberapa wilayah yang merupakan kumpulan komunitas masyarakat yang terbentuk atas dasar sistim kekerabatan dan paguyuban

berdasarkan keturunan (*gemeinschaft by blood*), dan yang menjadi pemuka, tokoh masyarakat, komunitas masyarakat tersebut berasal dari keluarga atau kerabat asli keturunan dari orang dipandang terkemuka dari segi sosial ekonomi atau terkemuka karena ketokohnya, sehingga warga masyarakat seringkali menyandarkan diri dan sikapnya terhadap pemuka atau tokoh masyarakat tersebut. Sikap ini mencerminkan adanya dominasi ketokohan yang berperan untuk menentukan sikap dan perilaku serta orientasi warga atau keluarganya bergantung pada pemuka masyarakat tersebut.

Paternalisme sikap dan perilaku warga masyarakat secara turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya tidak pernah berubah, meskipun terdapat berbagai perubahan dalam kondisi sosial ekonomi, namun hal tersebut tidak menjadi faktor yang mempengaruhi adanya perubahan sosial budaya masyarakat setempat. Kecenderungan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam berbagai kehidupan sosial ekonomi, sosial politik maupun sosial budaya, terbatas pada adanya sistem ide atau gagasan dari pemuka masyarakat untuk memodifikasi sistem sosial dan sistem budaya yang sudah mapan dalam kehidupan masyarakat disesuaikan dengan kondisi dan dinamika masyarakat. Faktor ini menjadi kendala bagi kandidat atau calon legislatif untuk menerobos masuk ke dalam komunitas masyarakat tersebut dalam rangka sosialisasi atau sekedar silaturahmi. Jika calon legislatif berhasil masuk ke dalam komunitas masyarakat tersebut, hanya sebatas etika pergaulan masyarakat yaitu menerima setiap tamu yang bersilaturahmi, tetapi tidak akan mengikuti apa yang diinginkan oleh kandidat atau calon legislatif yang bersangkutan.

2. Pola Pemukiman

Yang dimaksud dengan tempat tinggal atau pemukiman adalah tempat tinggal warga masyarakat yang memilih pada pemilu legislative 2009. Letak wilayah pola pemukiman warga menentukan sikap, pandangan, dan orientasi pemilih, karena keberadaan sikap, pandangan dan orientasi pemilih, karena keberadaan pemilih di suatu tempat ditentukan ikatan-ikatan sosial warga masyarakat tersebut, baik dari unsure keturunan, asal daerah, ras, agama, factor ekonomis dan sebagainya.

Hal tersebut terkait dengan pola pemukiman penduduk karena faktor identitas yang menyebabkan berkembangnya pola-pola pemukiman baru bagi penduduk kota, seperti kompleks perumahan baik yang bersifat umum

(perumahan yang dibangun pemerintah / swasta seperti kompleks BTN, Batara, Mayagraha, Salsabila, Permata Permai dan perumahan yang bersifat khusus seperti perumahan Bank Indonesia dan perumahan milik TNI.

b. Ikatan Primordial

Ikatan primordialisme keagamaan dan etnis menjadi salah satu alasan penting dari masyarakat dalam menyikapi terhadap elektabilitas calon legislatif. Jika seorang kandidat memiliki latar belakang ikatan primordialisme yang sama dengan ikatan primordialisme masyarakat, maka hal tersebut menjadi alternatif pilihan masyarakat. Ikatan emosional tersebut menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Ikatan emosional masyarakat tidak hanya didasarkan atas sistem kekerabatan semata, akan tetapi agama menjadi pengikat ikatan emosional, asal daerah atau tempat tinggal, ras, suku, budaya, dan status sosial ekonomi, sosial budaya juga menjadi unsur penting dalam ikatan emosional komunitas masyarakat tertentu. Hal tersebut terlihat pada basis komunitas masyarakat di daerah pemilihan Tawang – Cihideung, daerah/wilayah atau kantong-kantong basis massa yang ditandai dengan adanya simbol-simbol partai memberikan gambaran dan sekaligus sebagai pertanda bahwa di wilayah tersebut merupakan kantong basis massa partai tertentu.

Komunitas masyarakat yang heterogen cenderung lebih bersifat rasional, pragmatis, tidak mudah untuk dipengaruhi, terkadang memiliki sikap ambivalen, berorientasi ke materi. Sikap dan pandangan untuk memilih atau tidak memilih dalam proses politik lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi politiknya ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan primordialisme tertentu. Kondisi sosial masyarakat pada strata tersebut diperlukan adanya kandidat atau calon yang memiliki kapabilitas yang tinggi baik dari aspek sosiologis (memiliki kemampuan untuk mudah beradaptasi dengan kelompok masyarakat dan mampu mempengaruhi sikap dan orientasi komunitas masyarakat tersebut), atau popularitas dan reputasi tinggi pada kelompok masyarakat tersebut. Jika hal tersebut mampu dilakukan oleh seorang kandidat, maka sangat terbuka perolehan suara pemilih didapat dari komunitas masyarakat tersebut.

c. Penyebaran Penduduk

Faktor tingkat densitas atau penyebaran penduduk di suatu daerah ikut berperan menentukan perilaku pemilih, jika terdapat pola pemukiman penduduk

dengan kepadatan rendah cenderung masyarakatnya yang menjadi pemilih mudah untuk dikendalikan, meskipun tidak seluruhnya lapisan masyarakat dapat dikondisikan. Kecenderungan sikap dan perilaku pemilih untuk patuh pada pemuka, tokoh atau pimpinan masyarakat tersebut sangat besar, karena loyalitas masyarakat terhadap tokoh masyarakat tersebut cukup tinggi, sehingga perilaku pemilih dapat dengan mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berpengaruh di tempat pemukiman masyarakat dimaksud. Pola pemukiman seperti ini banyak terdapat di wilayah Kecamatan Tawang terutama di sebagian wilayah Kelurahan Kahuripan dan Kelurahan Cikalang.

Berbeda dengan pola pemukiman penduduk dengan kepadatan yang tinggi, seperti di sebagian wilayah yang termasuk Kecamatan Cihideung Kelurahan Cilembang dan Kelurahan Nagrawangi dan sebagian di kelurahan lainnya, kecenderungan perilaku pemilih sangat beragam, mereka pada umumnya tidak mudah dikendalikan atau dikondisikan, meskipun ada beberapa tempat yang mudah untuk dikendalikan/dikondisikan. Hal ini terkait dengan seberapa besar pengaruh pemuka masyarakat terhadap warga masyarakat sekitarnya. Perilaku pemilih pada pola pemukiman ini, lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya jika dibandingkan dengan mengedepankan kepentingan orang lain. Kegiatan warga masyarakat pada kelompok masyarakat tersebut dalam proses politik diperhitungkan dengan seberapa besar kompensasi yang akan diperolehnya dibandingkan dengan kegiatan keseharian mereka dalam mencari nafkah hidupnya. Terkecuali jika pemilih tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap, maka proses politik menjelang pemilu legislatif menjadi ajang mencari materi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

d. Loyalitas Pemilih

Loyalitas pemilih yang dimaksud, *pertama*, ketaatan pemilih terhadap parpol yang menjadi afiliasi pemilih, atau karena kesukaan pemilih terhadap pemilih, atau karena kesukaan pemilih terhadap pemilih, sebagai pendukung parpol, kader dan pengurus parpol. *Kedua*, adalah warga masyarakat biasa yang tidak berafiliasi terhadap parpol, bukan sebagai kader atau pengurus parpol.

Banyaknya partai politik peserta pemilu pada tahun ini, menjadi penyebab utama warga masyarakat beralih untuk memilih atau tidak memilih salah satu partai politik tertentu. Atau untuk memilih / tidak memilih calon legislatif dalam

pemilu legislatif tahun 2009. Alasan yang dikemukakan warga masyarakat di beberapa tempat tertentu mengemukakan sebagai berikut;

- 1). Adanya ajakan dari pengurus atau kader dan pemuka masyarakat untuk bergabung dengan partai baru dengan dalih akan dijadikan pengurus;
- 2). Adanya kekecewaan warga masyarakat terhadap partai politik tertentu yang menjajikan sesuatu akan tetapi tidak ditepati, sehingga pemilih menentukan sikap dan orientasi untuk tidak memilih calon legislatif dari partai politik tersebut.
- 3). Kekecewaan pengurus partai politik tertentu di tingkat bawah terhadap kepengurusan partai politik di tingkat atas, menyebabkan banyak pengurus partai politik tertentu di tingkat bawah berpindah menjadi pengurus partai politik lain atau partai politik baru, hal berdampak pada konstituennya ikut berpindah pilihan, baik terhadap partai politiknya maupun terhadap calon legislatifnya meskipun terdapat ikatan keluarga maupun ikatan-ikatan primordialisme yang lain;
- 4). Karena tidak terikat oleh partai politik, maka warga masyarakat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri, baik kepada partai politik maupun kepada calon legislatif;
- 5). Masih terdapat warga masyarakat yang tetap loyal terhadap partai politik tertentu, namun tidak akan memilih calon legislatif baik dari partai politik yang disukainya maupun dari partai politik lain; Hal ini disebabkan berbagai alasan yang mempengaruhi sikap dan orientasi pemilih, yaitu;
 - a. Platform partai politik tersebut sudah dipahami oleh pemilih, namun tidak tertarik terhadap calon yang diusung oleh partai politik yang bersangkutan;
 - b. Simbol, lambang, azas partai dan sudah terinternalisasi terhadap pemilih, namun sikap ketidaksukaan terhadap calon legislatif, dilatarbelakangi oleh adanya konflik antar pengurus atau antar kader dengan pengurus maupun antar calon legislatif dengan kader maupun anggota partai politik.
- 6) Masih terdapat warga masyarakat yang tingkat partisipasi politiknya cukup tinggi yaitu mereka akan tetap memilih calon legislatif yang disukainya dengan tidak melihat latar belakang partai politiknya;
- 7) Banyak warga masyarakat yang akan memilih calon legislatif dengan syarat-syarat tertentu; misalnya; calon yang bersangkutan pertama kali melakukan silaturahmi kepada warga masyarakat meskipun tidak ada ikatan perjanjian

tertentu. Calon pemilih akan memilih calon legislatif yang memiliki kualitas moral yang baik di masyarakat, memiliki kemampuan yang tinggi, sering bergaul dengan masyarakat, menunjukkan adanya bukti pengabdian terhadap warga masyarakat bukan berupa janji, warga masyarakat akan memilih calon yang memberikan kontribusi materi untuk memenuhi kebutuhan hidup warga masyarakat. Calon pemilih akan memilih calon legislatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum baik berupa sarana dan prasarana yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat.

8) Pada beberapa tempat pemukiman warga masyarakat di Kecamatan Tawang maupun Cihideung, terdapat komunitas pemilih yang memiliki sikap terbuka untuk menentukan pilihannya, dengan ketentuan bahwa calon legislatif yang mereka unggulkan untuk tingkat kota berasal dari partai politik tertentu, sedangkan untuk calon legislatif untuk tingkat provinsi dan pusat memilih calon dari partai politik lain dan sebaliknya.

e. Latar Belakang Faktor Pekerjaan atau Profesi

Pekerjaan atau profesi pemilih merupakan faktor yang kurang mendapat perhatian para calon legislatif menjelang pemilu bulan April 2009. Hal ini terkait dengan peluang dan kesempatan calon legislatif untuk bersosialisasi di tempat pekerjaan, karena ketatnya aturan untuk melakukan sosialisasi, sehingga calon legislatif tidak banyak dikenal oleh warga masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap. Demikian pula halnya dengan calon pemilih tidak banyak mengenal secara dekat dan langsung kepada calon legislatif itu sendiri.

Jumlah warga masyarakat yang memiliki pekerjaan/profesi yang tetap sangat banyak dan berpeluang bagi kandidat untuk meraih perolehan suara banyak. osialisasi calon legislatif pada kelompok masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap, terbatas pada waktu malam hari pada kesempatan tertentu, misalnya ; pada saat ada acara pengajian rutin di tempat tinggal warga masyarakat tersebut, atau pada waktu liburan kerja, meskipun hal tersebut menurut hemat penulis kurang efektif. Oleh karena sosialisasi yang dilakukan pada acara pengajian rutin tidak menjamin warga masyarakat terutama yang memiliki pekerjaan tetap akan dapat hadir pada acara tersebut, demikian pula pada waktu libur. Pegawai pada libur lebih banyak memanfaatkan waktu liur untuk acara keluarga atau pergi ke luar kota untuk berlibur.

Kondisi demikian sudah jelas tidak akan menguntungkan para calon legislatif di daerah pemilihan kecamatan Tawang – Cihideung, jika situasi dan kondisi tersebut tidak dimanfaatkan seoptimal mungkin oleh para calon legislatif untuk meraih perolehan suara dari segmen masyarakat pegawai. Artinya, memanfaatkan waktu, kesempatan, peluang dan akses ke segmen masyarakat pegawai, menggunakan orang-orang kunci yang mampu mengakomodir dua belah pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda.

B. Kandidat yang Diharapkan Pemilih

Keterpilihan seorang kandidat idealnya harus memenuhi standar yang diinginkan pemilih, artinya pemilih akan menentukan pilihannya didasarkan atas seberapa besar kontribusi dan partisipasi kandidat terhadap pemilih atau kelompok pemilih. Seberapa besar syarat-syarat kandidat terpenuhi secara umum seperti ; kapasitas intelektual, kapasitas kepemimpinan, kapasitas etika dan moral. Kejelasan tentang visi dan misi serta program yang disampaikan kandidat, apakah pemilih memahami akan visi dan misi yang disampaikan, apakah program yang akan dilakukan seorang kandidat sesuai dengan aspirasi, kebutuhan dan kepentingan masyarakat banyak atau tidak. Jika hal tersebut di atas tidak dipenuhi oleh seorang kandidat, maka pemilih pada suatu saat akan beralih sikap dan orientasinya ke kandidat lain.

F. KESIMPULAN

Bahwa perilaku politik berbeda dengan perilaku pemilih, perubahan sikap dan orientasi perilaku pemilih ditentukan oleh banyak faktor, sehingga untuk meraih perolehan suara bagi calon legislative pada pemilu 2009, seorang kandidat dituntut untuk mengetahui karakteristik perilaku pemilih dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan sikap dan orientasi pemilih yaitu :

1. Faktor tempat tinggal pemilih dengan karakteristiknya yakni : sistem kekerabatan dan pola pemukiman penduduk atau pemilih.
2. Faktor ikatan primodialisme penduduk masyarakat baik ikatan primodial keagamaan maupun etnis.
3. Faktor dentitas atau penyebaran penduduk di daerah pemilihan Cihideung-Tawang yang memiliki karakteristik yang sangat beragam.
4. Faktor loyalitas pemilih yang sangat ditentukan berbagai karakter yang melekat dalam perilaku, sikap dan pandangan pemilih yang dipengaruhi

simbol, lambang, atribut dan *platform* parpol, maupun sikap dan pandangan pemilih yang tidak terpengaruh oleh symbol, lambing, atribut dan platform parpol.

5. Faktor pekerjaan atau profesi, sangat menentukan sikap dan orientasi pemilih dalam menentukan elektabilitas caleg.
6. Kandidat caleg yang diharapkan oleh pemilih.

G. SARAN

Untuk menarik simpati pemilih guna memperoleh suara terbanyak dalam pemilu 2009, seorang kandidat perlu mensosialisasikan diri dengan seluruh strata masyarakat, dengan mengedepankan visi, misi dan program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, jangan mengedepankan janji-janji kepada masyarakat. Bagi pemilih disarankan untuk menentukan sikap dan pandangannya dengan memilih caleg yang benar-benar memenuhi syarat yaitu memiliki kapabilitas intelektual, kapabilitas kepemimpinan dan kapabilitas etik dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Apter, E. David. 1988. *Pengantar Analisa Politik*, alih bahasa Yasogama. CV Rajawali. Jakarta.
- Azwar, Saefuddin. 2003. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. (Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Duverger, Maurice. 1981. *Partai Politik Dan Kelompok Penekan*. Alih Bahasa Laila Hasyim. Jakarta.
- Easton, David. 1984. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. Alih Bahasa Sahat Simamora. Bina Aksara. Jakarta.
- Gaffar, Afan. 2002. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Haryanto. 1982. *Sistem Politik; Suatu Pengantar*. Liberty. Jakarta.
- Kantaprawira, Rusadi. 1988. *Sistem Politik Indonesia; Suatu Model Pengantar*. Sinar Baru. Jakarta.
- Lindlom, E. Charles. 1986. *Proses Penetapan Kebijakan*, Alih Bahasa Syamsudin Ardian. Erlangga. Jakarta.

- Mas'ood, Mohtar dan Nasikun. 1987. *Sosiologi Politik*. PAU-Studi Sosial UGM. Yogyakarta.
- Miles, Mathew dan A. Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Nawawi, Handari M. 1983. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajahmada University Press. Yogyakarta.
- Nazir, Muhamad. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Putra, Fadillah. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik: Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rush, Michael & Althoff, P. 1988. *Pengantar Sosiologi Politik*. Rineka Cipta.
- Setiawan, Bonnie. 2000. *Perjuangan Demokrasi dan Masyarakat Sipil: Reposisi dan Peran Ornop/LSM di Indonesia*. INFID. Jakarta.
- Silalahi, Oberlin. 1989. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara*. Liberty Yogyakarta.
- Sorensen, Georg. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Subakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widiasarana. Jakarta.
- Sukarna. 1981. *Sistem Politik*. Offset Alumni. Bandung
- Sutopo, H. 1988. *Pengantar Penelitian Kualitatif: dasar-dasar teoritis dan praktis*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta
- Toha, Miftah. 1993. *Perilaku Organisasi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada)
- Varma, S.P. 1990. *Teori Politik Modern*. Rajawali Pers. Jakarta
- Wahab, A. Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka Cipta. Jakarta